

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan terhadap Keuangan Pemerintah Daerah merupakan serangkaian proses yang mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, penyusunan laporan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan terhadap keuangan daerah. Dalam pelaksanaannya, Pengelolaan terhadap Keuangan Pemerintah Daerah harus dilakukan secara teratur dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, pengelolaan tersebut perlu memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, ekonomis, transparansi, serta akuntabilitas, dengan tetap mengedepankan nilai keadilan, kepatutan, dan Menghasilkan manfaat yang optimal bagi kepentingan masyarakat.

Pelaksanaan anggaran di lingkungan pemerintah daerah melibatkan serangkaian prosedur administrasi keuangan yang harus dilakukan secara tertib, transparan, dan akuntabel. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) merupakan salah satu tahapan penting yang berperan sebagai dasar administratif dalam proses pencairan dana yang memerintahkan Bendahara Umum Daerah untuk melakukan pencairan dana dari kas daerah kepada pihak yang berhak. SP2D merupakan bagian dari sistem penatausahaan keuangan yang bertujuan mencegah terjadinya pengeluaran tidak sah dan memastikan bahwa setiap pengeluaran sesuai dengan alokasi anggaran dan dokumen pendukung yang sah. Prosedur penerbitan SP2D perlu diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan agar pengelolaan keuangan daerah berjalan efektif dan

sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik.

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) merupakan dokumen yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan pencairan dana atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dokumen tersebut diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang bertindak sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) setelah menerima Surat Perintah Membayar (SPM) dari pihak yang berwenang. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 mengenai Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, SPM yang telah disampaikan kepada KPPN dapat menjadi dasar dalam proses penerbitan SP2D. Selanjutnya, proses pembayaran yang berkaitan dengan jaminan uang muka dicatat oleh KPPN melalui sistem atau aplikasi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Berdasarkan Permendagri 77 Tahun 2020 Surat Perintah Pencairan Dana atau SP2D adalah dokumen yang digunakan untuk mencairkan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM). SP2D berfungsi sebagai dasar pencatatan dalam sistem akuntansi instansi dan memastikan bahwa pengeluaran yang diminta tidak melebihi pagu anggaran yang disediakan. Syarat penerbitan SP2D meliputi kelengkapan dokumen yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Solok Selatan merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang terbentuk sejalan dengan berdirinya Kabupaten Solok Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten

Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat. Pembentukan BPKD menjadi bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki peran dalam mengelola berbagai sumber daya daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya, BPKD berkaitan dengan pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah, aset daerah, serta berbagai potensi penerimaan yang dapat menjadi sumber pendapatan daerah.

Pada tahun 2008, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tanggal 11 November 2008 mengenai Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Solok Selatan. Dengan adanya peraturan tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) mengalami perubahan nomenklatur menjadi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). Lembaga tersebut memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah, khususnya pada bidang belanja, perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta pengelolaan aset milik daerah.

BPKD Kabupaten Solok Selatan sebagai institusi yang memiliki tanggung jawab besar dalam pengelolaan keuangan daerah, berperan penting dalam mengelola Keuangan Daerah Khususnya dalam Perbendaharaan guna untuk mendukung kegiatan pemerintah daerah. Tantangan yang dihadapi Didalam penerbitan Surat perintah pencairan dana atau SP2D keterlambatan sinkronisasi data antar instansi, serta kendala teknis pada aplikasi yang digunakan, yang semuanya dapat menyebabkan penolakan, pembatalan, atau keterlambatan pencairan dana serta berdampak negatif pada pelaporan

keuangan. Dalam rangka mendukung pengembangan kompetensi mahasiswa serta memberikan kontribusi nyata kepada pemerintah daerah, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan magang di BPKD Kabupaten Solok Selatan terkait **“Prosedur Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pada Perbendaharaan BPKD Solok Selatan.”** Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai prosedur penerbitan surat perintah pencairan dana sp2d, dokumen – dokumen yang diperlukan, serta mengetahui proses verifikasi dan validasi dokumen dalam penerbitan surat perintah pencairan dana.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, rumusan masalah yang diangkat adalah:

1. Bagaimana prosedur penerbitan surat perintah pencairan dana (sp2d) pada perbendaharaan BPKD Solok Selatan?
2. Dokumen apa saja yang menjadi syarat dan pendukung dalam penerbitan SP2D di Perbendaharaan BPKD Kabupaten Solok Selatan?
3. Bagaimana faktor – faktor yang mempengaruhi penghambatan penerbitan SP2D pada perbendaharaan BPKD Solok Selatan?

1.3 Tujuan Penulisan

Berikut adalah tujuan penulisan yang dilakukan dari aktivitas magang yang akan di jalankan :

1. Menganalisis prosedur penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D) pada perbendaharaan BPKD Solok selatan

2. Mengetahui dokumen yang menjadu syarat dan pendukung dalam penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D)
3. Mengidentifikasi faktor – faktor yang mempengaruhi penghambatan penerbitan SP2D pada perbendaharaan BPKD Solok Selatan?

1.4 Manfaat Penulisan

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis mengenai prosedur penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D) di pemerintah daerah, khususnya di sektor keuangan. Selain itu hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya dalam bidang penerbitan SP2D di instansi pemerintah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi BPKD Solok Selatan : penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang konstruktif bagi BPKD Solok selatan dalam mengoptimalkan prosedur penerbitan SP2D, serta mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam penerbitan SP2D.
- b. Bagi pemerintah daerah: hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan dan langkah-langkah strategis yang lebih efektif terkait penerbitan SP2D untuk mendukung efisiensi anggaran dan transparansi pemerintahan.
- c. Bagi penulis: penelitian ini akan memberikan wawasan dan pengalaman praktis dalam memahami prosedur penerbitan SP2D di pemerintahan daerah,

serta meningkatkan kompetensi dibidang keuangan pemerintahan daerah.

1.5 Tempat dan Pelaksanaan Magang

Dalam menjalankan kegiatan magang, penulis melaksanakan magang di Jl. Bangun Rejo, Lubuk Gadang Sel., Kec. Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat. Kegiatan magang ini dilakukan selama minimal 40 (empat puluh) hari kerja.

1.6 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data untuk penulisan Tugas Akhir ini dilakukan dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. **Kepustakaan** : Berpedoman pada peraturan – peraturan pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah khususnya pemerintahan kabupaten solok selatan dalam penerbitan SP2D, serta memanfaatkan buku-buku tentang prosedur penerbitan SP2D.
2. **Lapangan** : Melakukan kunjungan ke institusi terkait untuk mengamati praktik Penerapan Prosedur penerbitan SP2D secara langsung.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika laporan magang ini dibagi menjadi beberapa bab yang membentuk satu kesatuan pemahaman masalah dengan rincian sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan magang, lokasi dan pelaksanaan magang.

BAB II : Landasan Teori

Membahas tentang pengertian prosedur penerbitan SP2D, dasar – dasar hukum dalam penerbitan SP2D, dan proses dalam pembuatan serta penerbitan SP2D.

BAB III : Gambaran Umum Perusahaan

gambaran umum tentang BPKD : Merupakan profil lembaga meliputi sejarah berdirinya BPKD, tujuan, lokasi, moto, tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi.

BAB IV : Pembahasan Mengenai prosedur penerbitan SP2D pada BPKD Solok Selatan.

BAB V : Kesimpulan

Membahas tentang kesimpulan laporan magang dan saran.

